

**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
TERJADI DALAM PENYIMPANGAN, PENERAPAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA
KEPADA BUMN PERSERO.**

TESIS



**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Pidana**

**Oleh:
JUSUF S TIMISELA
1502190014**

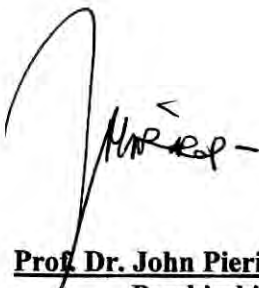
**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2018**

**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI
DALAM PENYIMPANGAN, PENERAPAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA KEPADA BUMN PERSERO.**

**Oleh:
JUSUF S TIMISELA
1502190014**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Pidana
Jakarta|2 Mei 2018**



**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S
Pembimbing 1**



**Dr. Mompang L. Panggabean, SH., M.Hum
Pembimbing 2**

**Mengetahui,
Program Magister Ilmu Hukum UKI
Ketua,**



Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum

**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI
DALAM PENYIMPANGAN, PENERAPAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA KEPADA BUMN PERSERO.**

**Oleh:
JUSUF S TIMISELA
1502190014**

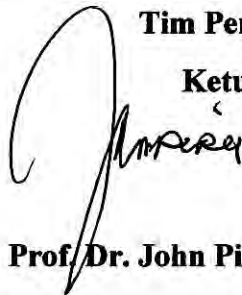
TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Pidana**

**Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis,
Pada hari Sabtu, Tanggal 12 Mei 2018**

Tim Penguji,

Ketua,



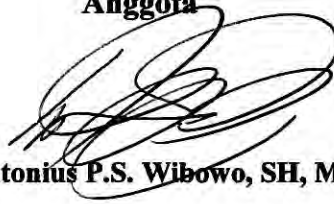
Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S.

Anggota



Dr. Mompang L. Panggabean, SH, M.Hum

Anggota



Dr. Antonius P.S. Wibowo, SH, MH

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (magister) baik di Universitas Kristen Indonesia maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari para Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis telah dengan jelas dicantumkan sebagai referensi dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 12 Mei 2018.

Yang membuat pernyataan,


JUSUF S TIMISELA, S.H.

Nomor Induk Mahasiswa: 1502190014

ABSTRAK

JUSUF S TIMISELA, S.H., (NIM.1502190014) dengan judul : PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DALAM PENYIMPANGAN, PENERAPAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BUMN PERSERO.

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dibawa bimbingan **Prof. Dr. John Pieris, S.H., S.M**, selaku Pembimbing I dan **Dr. Mompang L. Pangabean S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II.

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measures*). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap BUMN Persero dapat ditempuh dengan jalur lain seperti hukum perdata dan hukum administrasi harus didahulukan sebelum ditempuh melalui jalur hukum pidana. Penerapan asas *ultimum remedium* dapat dikatakan tepat karena penegakan hukum pidana terhadap BUMN Persero harus mempertimbangkan konteks situasi ekonomi dan sosial dari eksistensinya dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini di maksud untuk mengetahui keuangan negara mengacu pada UU PT/BUMN keuangan negara yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain. Pasal 1 angka 1 UUPT, mengatakan bahwa “Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”, Pasal 4 ayat 1 menyatakan “modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”, dan kemudian dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 di jelaskan bahwa “modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan oleh APBN, selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan oleh sistem APBN, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”.

Hasil penelitian dan pembahasan mewujudkan bahwa penerapan Asas *ultimum remedium* sebagai asas yang paling fundamental dalam hukum pidana dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN Persero, walaupun pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan tanpa pandang bulu, kegiatan BUMN Persero sebagaimana terdapat dalam kasus tindak pidana korupsi yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 2149 K/Pid.Sus/2011 dengan menekankan pada penyelesaian melalui hukum perdata dan hukum administrasi. Penerapan asas *ultimum remedium* juga sejalan dengan doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) dan teori analisis ekonomi terhadap hukum. Implikasi dari pendekatan ini ialah bahwa direksi BUMN Persero dapat melakukan keputusan bisnis berdasarkan *cost and benefit analysis*.

ABSTRACT

JUSUF S TIMISELA, S.H., (NIM.1502190014) entitled: *IMPLEMENTATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLES IN THE CORRUPTION MEASURES OF CRIMINAL INFRINGEMENT THAT HAPPENED IN THE IMPLEMENTATION, APPLICATION OF CAPITAL STATE PARTICIPATION TO SOE PERSERO.*

Master of Law Studies Program of the Indonesia Christian University. Brought by the guidance of Prof. Dr. John Pieris, S.H., S.M, as the 1st Counselor and Dr. Mompang L. Pangabean S.H., M.H., as the 2nd Supervisor II.

Corruption in Indonesia occurs systematically and extensively, not only harming the state's finances but also violating the social and economic rights of society at large, so corruption is an extraordinary crime (extra ordinary crime). Therefore, the eradication of corruption needs to be done in extraordinary ways (extra ordinary measures). Corruption Eradication of State-Owned Corporations can be pursued by other means such as civil law and administrative law must take precedence before being pursued through criminal law. The application of the ultimum remedium principle can be said precisely because the enforcement of criminal law against State-Owned Enterprises should consider the context of the economic and social situation of its existence in public life.

The issues discussed in this thesis are meant to know the state finance refers to the State owned / self-financing State Owned / Owned Enterprises Law or other parties in the form of money, securities, goods, goods and other rights. Article 1 Sub-Article 1 of the Company Law, states that "State-Owned Enterprises, hereinafter referred to as BUMNs, are entities wholly or mostly of state-owned capital through direct participation derived from separated state assets", Article 4 paragraph 1 states " of separated state assets ", and then in the elucidation of Article 4 paragraph 1 it is explained that" the capital of a State-Owned Enterprise is derived from state assets that have been separated by the State Revenues and Expenditures Budget, subsequently the development and management is not based on the state budget system, on the principles of a healthy company ".

The results of the study and discussion make it clear that the application of Ultimum Remedium Principle as the most fundamental principle in criminal law can be applied to corruption acts that occur in State-Owned Enterprises, although the eradication of corruption in Indonesia is currently undertaken indiscriminately, State-Owned Enterprises activities as contained in the case a criminal act of corruption which was decided by the Supreme Court Number 2149 K / Pid.Sus / 2011 by emphasizing on the settlement through civil law and administrative law. The application of the ultimum remedium principle is also in line with the Business Judgment Rule (BJR) doctrine and the theory of economic analysis of the law. The implication of this approach is that the directors of State-Owned Enterprises can make business decisions based on cost and benefit analysis.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kesehatan dan tuntunanNya, penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis berjudul “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Dalam Penyimpangan, Penerapan Penyertaan Modal Negara Kepada BumN Persero”, disusun karena adanya praktek korupsi yang terjadi dalam penyimpangan penyertaan modal, dan meningkatnya grafik tindak pidana korupsi, khususnya dalam lingkup BumN Persero. Fenomena terjadinya korupsi di Indonesia sesungguhnya lebih banyak berbentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan politik maupun ekonomi oleh *upper power class* dan *upper economic class*, dengan mempelajari kelemahan hukum, mereka melakukan konspirasi untuk tujuan kepentingan ekonomi tertentu yang pada akhirnya menimbulkan korupsi.

Tesis ini memaparkan sepenggal pemikiran ilmiah tentang asas *ultimum remedium* yang memiliki pemaknaan bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh dengan jalur lain seperti hukum perdata dan hukum administrasi harus didahulukan sebelum ditempuh melalui jalur hukum pidana. Penerapan asas *ultimum remedium* dapat dikatakan tepat karena penegakan hukum pidana terhadap BUMN Persero harus mempertimbangkan konteks situasi ekonomi dan sosial dari eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang diungkap dalam tesis ini adalah mengenai keuangan BUMN Persero apakah masih termasuk keuangan negara atau kekayaan negara yang dipisahkan sehingga

berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana khususnya terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,MH,MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indoensia.
2. Prof. Dr.John Pieris, S.H.,MS selaku Pembimbing I di tengah kesibukannya telah mengorbankan waktu untuk berkenan memberikan saran dan perbaikan terhadap pembuatan tesis ini.
3. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan selaku Pembimbing II.
4. Seluruh dosen atau pengajar pada Program Studi Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, khususnya Staf Program Magister Ilmu Hukum yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mata perkuliahan masing-masing.
5. Seluruh Karyawan pada Program Pasca Sarjan Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu Penulis dalam hal-hal administratif dan kelengkapan teknis lainnya.
6. Terima kasih yang teramat dalam kepada keluarga Saya, terutama anak dan istri yang selalu mendukung penulis selama mengerjakan dan menyelesaikan tesis ini.
7. Terima kasih tak terhingga juga penulis haturkan kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu-persatu atas bantuan yang telah diberikan baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis mengharapkan saran dan pendapat yang konstruktif dari pembaca, dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan tesis ini maupun koreksi bagi karya-karya ilmiah penulis dimasa yang akan datang.

Jakarta, Mei 2018

Penulis,



JUSUF S TIMISELA

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	13
1. Maksud Penelitian.....	13
2. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kerangka Teoritis dan Konsep.....	14
1. Kerangka Teoritis.....	14
2. Kerangka Konseptual	37
E. Metode Penelitian.....	40
1. Tipe Penelitian	41
2. Spesifikasi Penelitian	41
3. Metode Pendekatan	42
4. Teknik Pengumpulan Data.....	42
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	44
6. Sistematika Penelitian	44
BAB II TINJAUAN UMUM PERKEMBANGAN KORPORASI	
KHUSUSNYA BUMN DI INDONESIA	47
A. Perkembangan Korporasi	47
1. Pengertian, Sejarah, dan Latar Belakang Korporasi.....	47
2. Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana.....	54

a. Tahap Pertama	55
b. Tahap Kedua	56
c. Tahap ketiga.....	57
B. BUMN Di Indonesia	57
1. Pengertian, Sejarah, dan Latar Belakang BUMN	57
2. Maksud, Tujuan, dan Jenis BUMN	63
a. Maksud dan Tujuan BUMN	63
b. Jenis BUMN	66
c. Perusahaan Umum (Perum)	66
d. Perusahaan Perseroan (Persero).....	68
3. Kerugian Keuangan Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada BUMN.....	70
4. Organ Pengambilan Keputusan pada BUMN.....	74
5. Fiduciary Duty, Business Judgement Rule, dan Doktrin Alter Ego...	80
a. Fiduciary Duty	80
b. Business Judgement Rule dan Doktrin Alter Ego	83
C. Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum	86
D. Asas Ultimum Remedium	90
E. Sinkronisasi Hukum	94

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

DALAM PENGELOLAAN BUMN.....	99
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	99
1. Pertanggungjawaban Pidana	99
2. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	104
a. Teori Identifikasi	106
b. Teori Imputasi	107
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	110
B. Tindak Pidana Korupsi.....	118
1. Istilah, Pengertian, Jenis-jenis, dan Sebab-sebab Korupsi	118

2. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	131
3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia	138
C. Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Persero.....	141
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2006.....	141
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1764 K/Pid.Sus/2009	145
BAB IV ANALISIS PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI LINGKUNGAN BUMN PERSERO	149
A. Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Persero	149
B. Upaya Mengatasi Ketidaksinkronan Regulasi Terkait Keuangan Negara Dalam Lingkungan BUMN Persero.....	172
BAB V PENUTUP	191
A. Kesimpulan.....	191
B. Saran.....	193
DAFTAR PUSTAKA	195